



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 471, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Pusat. Kabupaten/Kota. Alokasi.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/PMK.07/2009 PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat, dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
 - b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan.

- (2) Perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (3) Perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp1.722.915.999.632,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 4

- (1) Perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran alokasi Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.

- (2) Penyaluran alokasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 204/PMK.07/2009 TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH PUSAT YANG
DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN
ANGGARAN 2010

**PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

dalam rupiah

NO	DAERAH	PBB
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	3.473.620.967
2	Kab. Aceh Besar	3.473.620.967
3	Kab. Aceh Selatan	3.473.620.967
4	Kab. Aceh Singkil	3.473.620.967
5	Kab. Aceh Tengah	3.473.620.967
6	Kab. Aceh Tenggara	3.473.620.967
7	Kab. Aceh Timur	3.473.620.967
8	Kab. Aceh Utara	3.473.620.967
9	Kab. Bireuen	3.473.620.967
10	Kab. Aceh Pidie	3.473.620.967
11	Kab. Simeuleu	3.473.620.967
12	Kota Banda Aceh	3.473.620.967
13	Kota Sabang	3.473.620.967
14	Kota Langsa	3.473.620.967
15	Kota Lhokseumawe	3.473.620.967
16	Kab. Nagan Raya	3.473.620.967
17	Kab. Aceh Jaya	3.473.620.967
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
19	Kab. Gayo Lues	3.473.620.967
20	Kab. Aceh Tamiang	3.473.620.967
21	Kab. Bener Meriah	3.473.620.967
22	Kab. Pidie Jaya	3.473.620.967
23	Kota Subulussalam	3.473.620.967
II	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Asahan	3.473.620.967
2	Kab. Dairi	3.473.620.967
3	Kab. Deli Serdang	3.473.620.967
4	Kab. Karo	3.473.620.967
5	Kab. Labuhan Batu	3.473.620.967
6	Kab. Langkat	3.473.620.967
7	Kab. Mandailing Natal	3.473.620.967
8	Kab. Nias	3.473.620.967
9	Kab. Simalungun	3.473.620.967
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.473.620.967
11	Kab. Tapanuli Tengah	3.473.620.967
12	Kab. Tapanuli Utara	3.473.620.967
13	Kab. Toba Samosir	3.473.620.967
14	Kota Binjai	3.473.620.967
15	Kota Medan	3.473.620.967
16	Kota Pematang Siantar	3.473.620.967
17	Kota Sibolga	3.473.620.967
18	Kota Tanjung Balai	3.473.620.967
19	Kota Tebing Tinggi	3.473.620.967
20	Kota Padang Sidempuan	3.473.620.967
21	Kab. Pakpak Bharat	3.473.620.967
22	Kab. Nias Selatan	3.473.620.967
23	Kab. Humbang Hasundutan	3.473.620.967
24	Kab. Serdang Bedagai	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
25	Kab. Samosir	3.473.620.967
26	Kab. Batu Bara	3.473.620.967
27	Kab. Padang Lawas Utara	3.473.620.967
28	Kab. Padang Lawas	3.473.620.967
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	3.473.620.967
30	Kab. Labuhan Batu Utara	3.473.620.967
31	Kab. Nias Utara	3.473.620.967
32	Kab. Nias Barat	3.473.620.967
33	Kota Gunung Sitoli	3.473.620.967
III	Provinsi Sumatera Barat	
1	Kab. Limapuluh Kota	3.473.620.967
2	Kab. Agam	3.473.620.967
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.473.620.967
4	Kab. Padang Pariaman	3.473.620.967
5	Kab. Pasaman	3.473.620.967
6	Kab. Pesisir Selatan	3.473.620.967
7	Kab. Sijunjung	3.473.620.967
8	Kab. Solok	3.473.620.967
9	Kab. Tanah Datar	3.473.620.967
10	Kota Bukit Tinggi	3.473.620.967
11	Kota Padang Panjang	3.473.620.967
12	Kota Padang	3.473.620.967
13	Kota Payakumbuh	3.473.620.967
14	Kota Sawahlunto	3.473.620.967
15	Kota Solok	3.473.620.967
16	Kota Pariaman	3.473.620.967
17	Kab. Pasaman Barat	3.473.620.967
18	Kab. Dharmasraya	3.473.620.967
19	Kab. Solok Selatan	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
IV	Provinsi Riau	
1	Kab. Bengkalis	3.473.620.967
2	Kab. Indragiri Hilir	3.473.620.967
3	Kab. Indragiri Hulu	3.473.620.967
4	Kab. Kampar	3.473.620.967
5	Kab. Kuantan Singingi	3.473.620.967
6	Kab. Pelalawan	3.473.620.967
7	Kab. Rokan Hilir	3.473.620.967
8	Kab. Rokan Hulu	3.473.620.967
9	Kab. Siak	3.473.620.967
10	Kota Dumai	3.473.620.967
11	Kota Pekanbaru	3.473.620.967
12	Kab. Kepulauan Meranti	3.473.620.967
V	Provinsi Kepulauan Riau	
1	Kab. Bintan	3.473.620.967
2	Kab. Natuna	3.473.620.967
3	Kab. Karimun	3.473.620.967
4	Kota Batam	3.473.620.967
5	Kota Tanjung Pinang	3.473.620.967
6	Kab. Lingga	3.473.620.967
7	Kab. Kepulauan Anambas	3.473.620.967
VI	Provinsi Jambi	
1	Kab. Batanghari	3.473.620.967
2	Kab. Bungo	3.473.620.967
3	Kab. Kerinci	3.473.620.967
4	Kab. Merangin	3.473.620.967
5	Kab. Muaro Jambi	3.473.620.967
6	Kab. Sarolangun	3.473.620.967
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.473.620.967
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
9	Kab. Tebo	3.473.620.967
10	Kota Jambi	3.473.620.967
11	Kota Sungai Penuh	3.473.620.967
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kab. Lahat	3.473.620.967
2	Kab. Musi Banyuasin	3.473.620.967
3	Kab. Musi Rawas	3.473.620.967
4	Kab. Muara Enim	3.473.620.967
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.473.620.967
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.473.620.967
7	Kota Palembang	3.473.620.967
8	Kota Pagar Alam	3.473.620.967
9	Kota Lubuk Linggau	3.473.620.967
10	Kota Prabumulih	3.473.620.967
11	Kab. Banyuasin	3.473.620.967
12	Kab. Ogan Ilir	3.473.620.967
13	Kab. OKU Timur	3.473.620.967
14	Kab. OKU Selatan	3.473.620.967
15	Kab. Empat Lawang	3.473.620.967
VIII	Provinsi Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka	3.473.620.967
2	Kab. Belitung	3.473.620.967
3	Kota Pangkal Pinang	3.473.620.967
4	Kab. Bangka Selatan	3.473.620.967
5	Kab. Bangka Tengah	3.473.620.967
6	Kab. Bangka Barat	3.473.620.967
7	Kab. Belitung Timur	3.473.620.967
IX	Provinsi Bengkulu	
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.473.620.967
2	Kab. Bengkulu Utara	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
3	Kab. Rejang Lebong	3.473.620.967
4	Kota Bengkulu	3.473.620.967
5	Kab. Kaur	3.473.620.967
6	Kab. Seluma	3.473.620.967
7	Kab. Mukomuko	3.473.620.967
8	Kab. Lebong	3.473.620.967
9	Kab. Kepahiang	3.473.620.967
10	Kab. Bengkulu Tengah	3.473.620.967
X	Provinsi Lampung	
1	Kab. Lampung Barat	3.473.620.967
2	Kab. Lampung Selatan	3.473.620.967
3	Kab. Lampung Tengah	3.473.620.967
4	Kab. Lampung Utara	3.473.620.967
5	Kab. Lampung Timur	3.473.620.967
6	Kab. Tanggamus	3.473.620.967
7	Kab. Tulang Bawang	3.473.620.967
8	Kab. Way Kanan	3.473.620.967
9	Kota Bandar Lampung	3.473.620.967
10	Kota Metro	3.473.620.967
11	Kab. Pesawaran	3.473.620.967
12	Kab. Pringsewu	3.473.620.967
13	Kab. Mesuji	3.473.620.967
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3.473.620.967
XI	Provinsi DKI Jakarta	17.368.104.835
XII	Provinsi Jawa Barat	
1	Kab. Bandung	3.473.620.967
2	Kab. Bekasi	3.473.620.967
3	Kab. Bogor	3.473.620.967
4	Kab. Ciamis	3.473.620.967
5	Kab. Cianjur	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
6	Kab. Cirebon	3.473.620.967
7	Kab. Garut	3.473.620.967
8	Kab. Indramayu	3.473.620.967
9	Kab. Karawang	3.473.620.967
10	Kab. Kuningan	3.473.620.967
11	Kab. Majalengka	3.473.620.967
12	Kab. Purwakarta	3.473.620.967
13	Kab. Subang	3.473.620.967
14	Kab. Sukabumi	3.473.620.967
15	Kab. Sumedang	3.473.620.967
16	Kab. Tasikmalaya	3.473.620.967
17	Kota Bandung	3.473.620.967
18	Kota Bekasi	3.473.620.967
19	Kota Bogor	3.473.620.967
20	Kota Cirebon	3.473.620.967
21	Kota Depok	3.473.620.967
22	Kota Sukabumi	3.473.620.967
23	Kota Cimahi	3.473.620.967
24	Kota Tasikmalaya	3.473.620.967
25	Kota Banjar	3.473.620.967
26	Kab. Bandung Barat	3.473.620.967
XIII	Provinsi Banten	
1	Kab. Lebak	3.473.620.967
2	Kab. Pandeglang	3.473.620.967
3	Kab. Serang	3.473.620.967
4	Kab. Tangerang	3.473.620.967
5	Kota Cilegon	3.473.620.967
6	Kota Tangerang	3.473.620.967
7	Kota Serang	3.473.620.967
8	Kota Tangerang Selatan	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
1	Kab. Banjarnegara	3.473.620.967
2	Kab. Banyumas	3.473.620.967
3	Kab. Batang	3.473.620.967
4	Kab. Blora	3.473.620.967
5	Kab. Boyolali	3.473.620.967
6	Kab. Brebes	3.473.620.967
7	Kab. Cilacap	3.473.620.967
8	Kab. Demak	3.473.620.967
9	Kab. Grobogan	3.473.620.967
10	Kab. Jepara	3.473.620.967
11	Kab. Karanganyar	3.473.620.967
12	Kab. Kebumen	3.473.620.967
13	Kab. Kendal	3.473.620.967
14	Kab. Klaten	3.473.620.967
15	Kab. Kudus	3.473.620.967
16	Kab. Magelang	3.473.620.967
17	Kab. Pati	3.473.620.967
18	Kab. Pekalongan	3.473.620.967
19	Kab. Pemasang	3.473.620.967
20	Kab. Purbalingga	3.473.620.967
21	Kab. Purworejo	3.473.620.967
22	Kab. Rembang	3.473.620.967
23	Kab. Semarang	3.473.620.967
24	Kab. Sragen	3.473.620.967
25	Kab. Sukoharjo	3.473.620.967
26	Kab. Tegal	3.473.620.967
27	Kab. Temanggung	3.473.620.967
28	Kab. Wonogiri	3.473.620.967
29	Kab. Wonosobo	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
30	Kota Magelang	3.473.620.967
31	Kota Pekalongan	3.473.620.967
32	Kota Salatiga	3.473.620.967
33	Kota Semarang	3.473.620.967
34	Kota Surakarta	3.473.620.967
35	Kota Tegal	3.473.620.967
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
1	Kab. Bantul	3.473.620.967
2	Kab. Gunung Kidul	3.473.620.967
3	Kab. Kulon Progo	3.473.620.967
4	Kab. Sleman	3.473.620.967
5	Kota Yogyakarta	3.473.620.967
XVI	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab. Bangkalan	3.473.620.967
2	Kab. Banyuwangi	3.473.620.967
3	Kab. Blitar	3.473.620.967
4	Kab. Bojonegoro	3.473.620.967
5	Kab. Bondowoso	3.473.620.967
6	Kab. Gresik	3.473.620.967
7	Kab. Jember	3.473.620.967
8	Kab. Jombang	3.473.620.967
9	Kab. Kediri	3.473.620.967
10	Kab. Lamongan	3.473.620.967
11	Kab. Lumajang	3.473.620.967
12	Kab. Madiun	3.473.620.967
13	Kab. Magetan	3.473.620.967
14	Kab. Malang	3.473.620.967
15	Kab. Mojokerto	3.473.620.967
16	Kab. Nganjuk	3.473.620.967
17	Kab. Ngawi	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
18	Kab. Pacitan	3.473.620.967
19	Kab. Pamekasan	3.473.620.967
20	Kab. Pasuruan	3.473.620.967
21	Kab. Ponorogo	3.473.620.967
22	Kab. Probolinggo	3.473.620.967
23	Kab. Sampang	3.473.620.967
24	Kab. Sidoarjo	3.473.620.967
25	Kab. Situbondo	3.473.620.967
26	Kab. Sumenep	3.473.620.967
27	Kab. Trenggalek	3.473.620.967
28	Kab. Tuban	3.473.620.967
29	Kab. Tulungagung	3.473.620.967
30	Kota Blitar	3.473.620.967
31	Kota Kediri	3.473.620.967
32	Kota Madiun	3.473.620.967
33	Kota Malang	3.473.620.967
34	Kota Mojokerto	3.473.620.967
35	Kota Pasuruan	3.473.620.967
36	Kota Probolinggo	3.473.620.967
37	Kota Surabaya	3.473.620.967
38	Kota Batu	3.473.620.967
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kab. Bengkayang	3.473.620.967
2	Kab. Landak	3.473.620.967
3	Kab. Kapuas Hulu	3.473.620.967
4	Kab. Ketapang	3.473.620.967
5	Kab. Pontianak	3.473.620.967
6	Kab. Sambas	3.473.620.967
7	Kab. Sanggau	3.473.620.967
8	Kab. Sintang	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
9	Kota Pontianak	3.473.620.967
10	Kota Singkawang	3.473.620.967
11	Kab. Sekadau	3.473.620.967
12	Kab. Melawi	3.473.620.967
13	Kab. Kayong Utara	3.473.620.967
14	Kab. Kubu Raya	3.473.620.967
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kab. Barito Selatan	3.473.620.967
2	Kab. Barito Utara	3.473.620.967
3	Kab. Kapuas	3.473.620.967
4	Kab. Kotawaringin Barat	3.473.620.967
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.473.620.967
6	Kota Palangkaraya	3.473.620.967
7	Kab. Barito Timur	3.473.620.967
8	Kab. Murung Raya	3.473.620.967
9	Kab. Pulang Pisau	3.473.620.967
10	Kab. Gunung Mas	3.473.620.967
11	Kab. Lamandau	3.473.620.967
12	Kab. Sukamara	3.473.620.967
13	Kab. Katingan	3.473.620.967
14	Kab. Seruyan	3.473.620.967
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kab. Banjar	3.473.620.967
2	Kab. Barito Kuala	3.473.620.967
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.473.620.967
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.473.620.967
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3.473.620.967
6	Kab. Kota Baru	3.473.620.967
7	Kab. Tabalong	3.473.620.967
8	Kab. Tanah Laut	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
9	Kab. Tapin	3.473.620.967
10	Kota Banjar Baru	3.473.620.967
11	Kota Banjarmasin	3.473.620.967
12	Kab. Balangan	3.473.620.967
13	Kab. Tanah Bumbu	3.473.620.967
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kab. Berau	3.473.620.967
2	Kab. Bulungan	3.473.620.967
3	Kab. Kutai Kartanegara	3.473.620.967
4	Kab. Kutai Barat	3.473.620.967
5	Kab. Kutai Timur	3.473.620.967
6	Kab. Malinau	3.473.620.967
7	Kab. Nunukan	3.473.620.967
8	Kab. Paser	3.473.620.967
9	Kota Balikpapan	3.473.620.967
10	Kota Bontang	3.473.620.967
11	Kota Samarinda	3.473.620.967
12	Kota Tarakan	3.473.620.967
13	Kab. Penajam Paser Utara	3.473.620.967
14	Kab. Tana Tidung	3.473.620.967
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kab. Bolaang Mongondow	3.473.620.967
2	Kab. Minahasa	3.473.620.967
3	Kab. Sangihe	3.473.620.967
4	Kota Bitung	3.473.620.967
5	Kota Manado	3.473.620.967
6	Kab. Kepulauan Talaud	3.473.620.967
7	Kab. Minahasa Selatan	3.473.620.967
8	Kota Tomohon	3.473.620.967
9	Kab. Minahasa Utara	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
10	Kota Kotamobagu	3.473.620.967
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.473.620.967
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.473.620.967
13	Kab. Minahasa Tenggara	3.473.620.967
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.473.620.967
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.473.620.967
XXII	Provinsi Gorontalo	
1	Kab. Boalemo	3.473.620.967
2	Kab. Gorontalo	3.473.620.967
3	Kota Gorontalo	3.473.620.967
4	Kab. Pohuwato	3.473.620.967
5	Kab. Bone Bolango	3.473.620.967
6	Kab. Gorontalo Utara	3.473.620.967
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kab. Banggai	3.473.620.967
2	Kab. Banggai Kepulauan	3.473.620.967
3	Kab. Buol	3.473.620.967
4	Kab. Toli-Toli	3.473.620.967
5	Kab. Donggala	3.473.620.967
6	Kab. Morowali	3.473.620.967
7	Kab. Poso	3.473.620.967
8	Kota Palu	3.473.620.967
9	Kab. Parigi Moutong	3.473.620.967
10	Kab. Tojo Una Una	3.473.620.967
11	Kab. Sigi	3.473.620.967
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kab. Bantaeng	3.473.620.967
2	Kab. Barru	3.473.620.967
3	Kab. Bone	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
4	Kab. Bulukumba	3.473.620.967
5	Kab. Enrekang	3.473.620.967
6	Kab. G o w a	3.473.620.967
7	Kab. Jeneponto	3.473.620.967
8	Kab. Luwu	3.473.620.967
9	Kab. Luwu Utara	3.473.620.967
10	Kab. M a r o s	3.473.620.967
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.473.620.967
12	Kab. Pinrang	3.473.620.967
13	Kab. Selayar	3.473.620.967
14	Kab. Sidenreng Rappang	3.473.620.967
15	Kab. Sinjai	3.473.620.967
16	Kab. Soppeng	3.473.620.967
17	Kab. Takalar	3.473.620.967
18	Kab. Tana Toraja	3.473.620.967
19	Kab. Wajo	3.473.620.967
20	Kota Pare-pare	3.473.620.967
21	Kota Makassar	3.473.620.967
22	Kota Palopo	3.473.620.967
23	Kab. Luwu Timur	3.473.620.967
24	Kab. Toraja Utara	3.473.620.967
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kab. Majene	3.473.620.967
2	Kab. Mamuju	3.473.620.967
3	Kab. Polewali Mandar	3.473.620.967
4	Kab. Mamasa	3.473.620.967
5	Kab. Mamuju Utara	3.473.620.967
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
1	Kab. Buton	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
2	Kab. Konawe	3.473.620.967
3	Kab. Kolaka	3.473.620.967
4	Kab. Muna	3.473.620.967
5	Kota Kendari	3.473.620.967
6	Kota Bau-bau	3.473.620.967
7	Kab. Konawe Selatan	3.473.620.967
8	Kab. Bombana	3.473.620.967
9	Kab. Wakatobi	3.473.620.967
10	Kab. Kolaka Utara	3.473.620.967
11	Kab. Konawe Utara	3.473.620.967
12	Kab. Buton Utara	3.473.620.967
XXVII	Provinsi Bali	
1	Kab. Badung	3.473.620.967
2	Kab. Bangli	3.473.620.967
3	Kab. Buleleng	3.473.620.967
4	Kab. Gianyar	3.473.620.967
5	Kab. Jembrana	3.473.620.967
6	Kab. Karangasem	3.473.620.967
7	Kab. Klungkung	3.473.620.967
8	Kab. Tabanan	3.473.620.967
9	Kota Denpasar	3.473.620.967
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
1	Kab. Bima	3.473.620.967
2	Kab. Dompu	3.473.620.967
3	Kab. Lombok Barat	3.473.620.967
4	Kab. Lombok Tengah	3.473.620.967
5	Kab. Lombok Timur	3.473.620.967
6	Kab. Sumbawa	3.473.620.967
7	Kota Mataram	3.473.620.967
8	Kota Bima	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
9	Kab. Sumbawa Barat	3.473.620.967
10	Kab. Lombok Utara	3.473.620.967
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kab. Alor	3.473.620.967
2	Kab. Belu	3.473.620.967
3	Kab. Ende	3.473.620.967
4	Kab. Flores Timur	3.473.620.967
5	Kab. Kupang	3.473.620.967
6	Kab. Lembata	3.473.620.967
7	Kab. Manggarai	3.473.620.967
8	Kab. Ngada	3.473.620.967
9	Kab. Sikka	3.473.620.967
10	Kab. Sumba Barat	3.473.620.967
11	Kab. Sumba Timur	3.473.620.967
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.473.620.967
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.473.620.967
14	Kota Kupang	3.473.620.967
15	Kab. Rote Ndao	3.473.620.967
16	Kab. Manggarai Barat	3.473.620.967
17	Kab. Nagekeo	3.473.620.967
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.473.620.967
19	Kab. Sumba Tengah	3.473.620.967
20	Kab. Manggarai Timur	3.473.620.967
21	Kab. Sabu Raijua	3.473.620.967
XXX	Provinsi Maluku	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.473.620.967
2	Kab. Maluku Tengah	3.473.620.967
3	Kab. Maluku Tenggara	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
4	Kab. Pulau Buru	3.473.620.967
5	Kota Ambon	3.473.620.967
6	Kab. Seram Bagian Barat	3.473.620.967
7	Kab. Seram Bagian Timur	3.473.620.967
8	Kab. Kepulauan Aru	3.473.620.967
9	Kota Tual	3.473.620.967
10	Kab. Maluku Barat Daya	3.473.620.967
11	Kab. Buru Selatan	3.473.620.967
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah	3.473.620.967
2	Kab. Halmahera Barat	3.473.620.967
3	Kota Ternate	3.473.620.967
4	Kab. Halmahera Timur	3.473.620.967
5	Kota Tidore Kepulauan	3.473.620.967
6	Kab. Kepulauan Sula	3.473.620.967
7	Kab. Halmahera Selatan	3.473.620.967
8	Kab. Halmahera Utara	3.473.620.967
9	Kab. Pulau Morotai	3.473.620.967
XXXII	Provinsi Papua	
1	Kab. Biak Numfor	3.473.620.967
2	Kab. Jayapura	3.473.620.967
3	Kab. Jayawijaya	3.473.620.967
4	Kab. Merauke	3.473.620.967
5	Kab. Mimika	3.473.620.967
6	Kab. Nabire	3.473.620.967
7	Kab. Paniai	3.473.620.967
8	Kab. Puncak Jaya	3.473.620.967
9	Kab. Kepulauan Yapen	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
10	Kota Jayapura	3.473.620.967
11	Kab. Sarmi	3.473.620.967
12	Kab. Keerom	3.473.620.967
13	Kab. Yahukimo	3.473.620.967
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.473.620.967
15	Kab. Tolikara	3.473.620.967
16	Kab. Boven Digoel	3.473.620.967
17	Kab. Mappi	3.473.620.967
18	Kab. Asmat	3.473.620.967
19	Kab. Waropen	3.473.620.967
20	Kab. Supiori	3.473.620.967
21	Kab. Mamberamo Raya	3.473.620.967
22	Kab. Mamberamo Tengah	3.473.620.967
23	Kab. Yalimo	3.473.620.967
24	Kab. Lanny Jaya	3.473.620.967
25	Kab. Nduga	3.473.620.967
26	Kab. Puncak	3.473.620.967
27	Kab. Dogiyai	3.473.620.967
28	Kab. Intan Jaya	3.473.620.967
29	Kab. Deiyai	3.473.620.967
XXXIII	Provinsi Papua Barat	
1	Kab. Sorong	3.473.620.967
2	Kab. Manokwari	3.473.620.967
3	Kab. Fak Fak	3.473.620.967
4	Kota Sorong	3.473.620.967
5	Kab. Sorong Selatan	3.473.620.967
6	Kab. Raja Ampat	3.473.620.967
7	Kab. Teluk Bintuni	3.473.620.967

NO	DAERAH	PBB
8	Kab. Teluk Wondama	3.473.620.967
9	Kab. Kaimana	3.473.620.967
10	Kab. Tambrau	3.473.620.967
11	Kab. Maybrat	3.473.620.967
	Total	1.722.915.999.632

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SRI MULYANI INDRAWATI